



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kidang Pananjung Pangandaran Kode Pos 46396
e-mail: bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 188.4 / 49.a / Bapenda.1 /
2022 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2022 - 2026
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi pejabat struktural di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/ 64 /Bapenda.1/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
- KESATU : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran;
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Tahun 2022-2023. di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap individu dan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini'.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal : 30 September 2022



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600914 199203 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
- Tugas : melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Bapenda.
- Fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bapenda;
 b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan
 c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkait tugas dan fungsinya;

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah tersedianya administrasi perkantoran}}{100\% \text{ Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran}} \times 100\%$	LRA
Optimalnya kondisi sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah sarpras layak fungsi}}{\text{Jumlah sarpras yang tersedia}} \times 100\%$	LRA
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti}}{\text{Jumlah aparatur yang diusulkan}} \times 100\%$	LRA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Bidang Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Tugas : perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis serta pelaksanaan kebijakan program kerja dibidang PBB-P2 dan BPHTB.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	$\frac{\text{Jumlah Realisasi pajak PBB BPHTB} \times 100\%}{\text{Jumlah Target pajak PBB BPHTB}}$	Laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
- Tugas : perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis serta pelaksanaan kebijakan program kerja dibidang Pajak Daerah Lainnya.
- Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
 b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
 c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
 d. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya dan;
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah Lainnya}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Lainnya}} \times 100\%$	Laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan** : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- Tugas** : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.
- Fungsi** :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatan dan sub bidang pengelolaan sistem informasi;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatan dan sub bidang pengelolaan sistem informasi;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatan dan sub bidang pengelolaan sistem informasi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatan dan sub bidang pengelolaan sistem informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah} \times 100\%}{\text{Jumlah target penerimaan pajak daerah}}$	Laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Tugas : mengumpulkan bahan dan melaukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Bapenda.
- Fungsi : a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
 d. mengoordinasikan urusan umum dan Kepegawaian; dan
 e. mengoordinasikan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkait tugas dan fungsinya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen perencanaan kinerja, penganggaran dan pelaporan	Renja, RKA, Laporan Keuangan
	Jumlah dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	Dokumen penganggaran, dan pelaporan keuangan	DPA, Laporan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis kecukupan administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran, kepegawaian dan jasa air, listrik dan telepon	Data umum dan kepegawaian
Optimalnya kondisi sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang optimal	Sarpras gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan kantor	Data sarpras
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Aparatur yang mengikuti bimtek	Data umum dan kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
- Tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan operasional, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB.
- Fungsi : a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 d. mengevaluasi dan melaporan di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB; dan
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya validitas data pajak daerah	Jumlah desa yang dilakukan pendataan Sismiop	Cukup jelas	Data Sismiop PBB-P2

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya
- Tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan operasional, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah Lainnya.
- Fungsi : a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya;
 b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya;
 c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya;
 d. memantau, monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya validitas data pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan pendataan Sipadaran	Cukup jelas	Data Sipadaran Pajak Daerah Lainnya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB
- Tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan operasional, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
- Fungsi : a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di sub bidang penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di sub bidang penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 d. mengevaluasi dan melaporkan di sub bidang penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah Sektor PBB-P2 dan BPHTB	$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Jumlah target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$	Data realisasi penerimaan pajak PBB-P2 dan BPHTB

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya
- Tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan operasional, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Lainnya.
- Fungsi : a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di sub bidang penetapan dan penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang penetapan dan penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di sub bidang penetapan dan penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 d. memantau, monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub bidang penetapan dan penagihan Pajak Daerah Lainnya; dan
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Jumlah target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$	Data realisasi penerimaan pajak Daerah Lainnya

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan
- Tugas : menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan Daerah dan Keberatan Pajak Daerah.
- Fungsi : a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan;
 b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan;
 c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan;
 d. memantau, evaluasi dan pelaporan di sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan kesadaran aparatur dan masyarakat tentang perpajakan	Jumlah kecamatan sosialisasi pajak daerah	Cukup jelas	Data obyek/wajib pajak
Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Jumlah obyek pajak yang diperiksa	Cukup jelas	Berkas pengajuan pelayanan pajak daerah
Meningkatnya penerima pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan PAD tahun } n}{\text{Jumlah target penerimaan PAD tahun } n-1} \times 100\%$	Data penerimaan PAD
Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penataan regulasi	Jumlah regulasi yang disusun	Perda / perbup tentang pajak daerah / retribusi daerah	Data penerimaan pajak daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
- Tugas : melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
- Fungsi : a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 d. memantau, evaluasi dan pelaporan di sub Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya sistem informasi pengelolaan pajak daerah	Jumlah aplikasi yang dibuat	Cukup jelas	Aplikasi SIM PBB
Meningkatnya tertib administrasi pembukuan pendapatan asli daerah	Jumlah OPD yang tertib administrasi pencatatan / pembukuan penerimaan pendapatan daerah	OPD yang melaporkan penerimaan PAD tepat waktu	Laporan penerimaan PAD
Meningkatnya tertib administrasi pelaporan pendapatan asli daerah	Jumlah OPD yang melaporkan PAD tepat waktu	OPD yang melaporkan penerimaan PAD tepat waktu	OPD pemungut PAD

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangandaran



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19600914 199203 1 004

